MudaBicara
Youthful Voice, Voice the Future!

Telaah Kebijakan

Bencana yang Berulang, Respons yang Tertinggal

Menguji Komitmen Pemerintah Prabowo terhadap Ketahanan Bencana Nasional

mudabicara.id | @mudabicaraid | Muda Bicara ID

Bencana yang Berulang, Respons yang Tertinggal:
Menguji Komitmen Pemerintah Prabowo terhadap Ketahanan Bencana Nasional

Penanggungjawab:
- Moch Edward Trias Pahlevi

Editor dan Kurator:
- Muhammad Iqbal Khatami

Peneliti:
- Imamah Hasyyati Labibah
- Hanif Zaimar Rahman

Penyuntingan dan Tata Letak: Muda Bicara ID
www.mudabicara.id
Dipublikasikan Oktober 2026

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana geologis tertinggi di dunia karena terletak di **Cincin Api Pasifik (Pacific Ring of Fire)**. Posisi ini menyebabkan aktivitas tektonik dan vulkanik yang sangat intens, sehingga banyak wilayah di Indonesia rentan terhadap gempa bumi dan letusan gunung api.

43.439
kejadian gempa bumi sepanjang 2025

153
gempa di atas Magnitudo 5

Sebagian besar gempa yang terjadi berkekuatan di bawah magnitudo 5. Namun, gempa dengan kekuatan besar tetap menjadi ancaman serius, **terutama ketika memicu tsunami yang dapat menimbulkan dampak luas bagi masyarakat dan wilayah pesisir.**

Wilayah dengan kerawanan tinggi

1. bagian barat Pulau Sumatera
2. bagian selatan Pulau Jawa
3. Bali dan Nusa Tenggara
4. Maluku dan Maluku Utara
5. wilayah tengah hingga utara Pulau Sulawesi
6. bagian utara Papua

Ancaman Bencana Hidrometeorologis

Selain bencana geologis, Indonesia juga rentan terhadap bencana hidrometeorologis seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan kekeringan karena **beriklim tropis di wilayah khatulistiwa.** Perubahan iklim dan pemanasan global semakin memperparah risiko tersebut. **Musim kemarau yang lebih panjang** meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan, sementara **kenaikan suhu permukaan bumi** memperbesar perbedaan tekanan udara yang dapat memicu lebih banyak kejadian puting beliung.



KILAS BALIK FENOMENA BENCANA ALAM DI INDONESIA SELAMA PEMERINTAHAN PRESIDEN PRABOWO

01 Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur



4 November 2024

Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur

Sedikitnya 9 orang meninggal dunia dan 1 orang dalam kondisi kritis; 2.472 warga dari 8 desa di dua kecamatan mengungsi akibat rusaknya tempat tinggal dan tertutupnya akses kelayıakan hidup dasar.

02 Banjir bandang disertai tanah longsor akibat curah hujan ekstrem di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat



25 November 2025

Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat

BNPB melaporkan total 1.006 orang meninggal hingga 13 Desember 2025; Aceh 407 tewas, Sumatera Utara 343, Sumatera Barat 256, dan 217 orang masih hilang yang kemungkinan besar telah menjadi korban.

03 Kebakaran Hutan Kalimantan (Karhutla)



Agustus sampai saat ini 2026

Kalimantan

Per 30 Agustus 2026 di Kalimantan Tengah tercatat 49.551 titik panas, 2.222 kejadian karhutla, dan 6.358,71 hektare area terbakar; kualitas udara Palangkaraya memburuk dan konsentrasi PM2.5 menembus 128,4 µg/m³, sangat tidak sehat.

04 Gempa Bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur



15 Agustus 2026

Flores, Nusa Tenggara Timur

Gempa magnitudo 7,7 menyebabkan 135 orang meninggal per 8/9/2026, 1.763 luka-luka, 70.382 mengungsi, 712 fasilitas pendidikan rusak, 157 fasilitas kesehatan rusak, 663 unit perkantoran rusak, serta gempa susulan menimpa pengungsi dan menyebabkan 94 warga meninggal di tempat pengungsian.

Data di atas menunjukkan bahwa Indonesia telah berulang kali mengalami bencana alam berskala besar selama periode ini.

MudaBicara

REFLEKSI GEMPA NTT

Salah satu contoh terbaru dampak destruktif gempa bumi adalah gempa Flores pada 15 Agustus 2026. Gempa berkekuatan M7,7 ini menyebabkan kerusakan besar dan dampak sosial yang luas. Hingga Selasa (8/9/2026), tercatat:

- **135** orang meninggal dunia
- **1.763** orang mengalami luka-luka
- **70,382** masyarakat harus mengungsi
- **712** fasilitas pendidikan rusak
- **157** fasilitas kesehatan terdampak
- **663** unit perkantoran rusak



15.722 GEMPA SUSULAN

BMKG mencatat bahwa dalam 30 hari setelah gempa utama hingga 15 September 2026 pukul 05.00 WIB, terjadi **15.722** gempa susulan dengan magnitudo M0,9 hingga M6,2, dan **190** di antaranya dirasakan oleh masyarakat.



RESPONS PEMERINTAH

Pemerintah menangani bencana secara terintegrasi dengan memastikan kebutuhan dasar, logistik, layanan pendidikan, serta pendataan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kemensos mengoperasikan 3 dapur umum di Mano, Pota, dan Dampek di Manggarai Timur. Sejak 19 Agustus, dapur umum ini memproduksi

6.000 bungkus makanan/hari
untuk dua kali makan.

Kemensos juga mendistribusikan beras, sembako, tenda, selimut, kasur, dan berbagai perlengkapan darurat lainnya.

CATATAN KRITIS

Meski berbagai upaya telah dilakukan, tantangan masih tetap ada, terutama dalam kecepatan respons, koordinasi antar-lembaga, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak. Tingginya angka kematian di pengungsian pasca gempa Flores menunjukkan bahwa masalahnya bukan hanya pada besarnya ancaman, tetapi juga pada kesiapan sistem dalam fase tanggap darurat.

Telaah Kebijakan

MudaBicara
Youthful Voice, Voice the Future!

Komitmen Politik atau Sekadar Retorika?

Menguji posisi isu kebencanaan dalam agenda pembangunan nasional

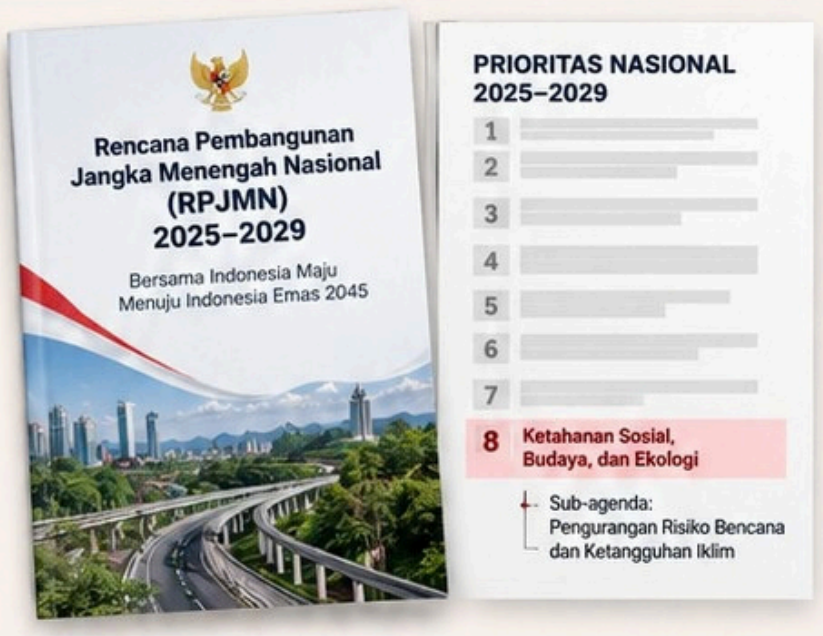
Isu kebencanaan kerap muncul dalam pidato politik sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan rakyat. Namun, pertanyaannya adalah sejauh mana komitmen tersebut benar-benar diterjemahkan ke dalam program prioritas dan rencana pembangunan nasional?

Visi, Misi, dan Program Prabowo-Gibran 2024–2029



Dalam dokumen visi-misi Prabowo-Gibran, isu kebencanaan memang disebut dalam Asta Cita. Namun, **isu ini tidak masuk ke dalam 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat.**

RPJMN 2025–2029



Dalam RPJMN 2025–2029, kebencanaan juga **tidak berdiri sebagai prioritas tersendiri**, melainkan hanya menjadi sub-agenda di bawah Prioritas Nasional 8.

✓ Ada dalam narasi

- Disebut dalam Asta Cita
- Menekankan mitigasi dan penanggulangan

✗ Lemah dalam prioritas aksi

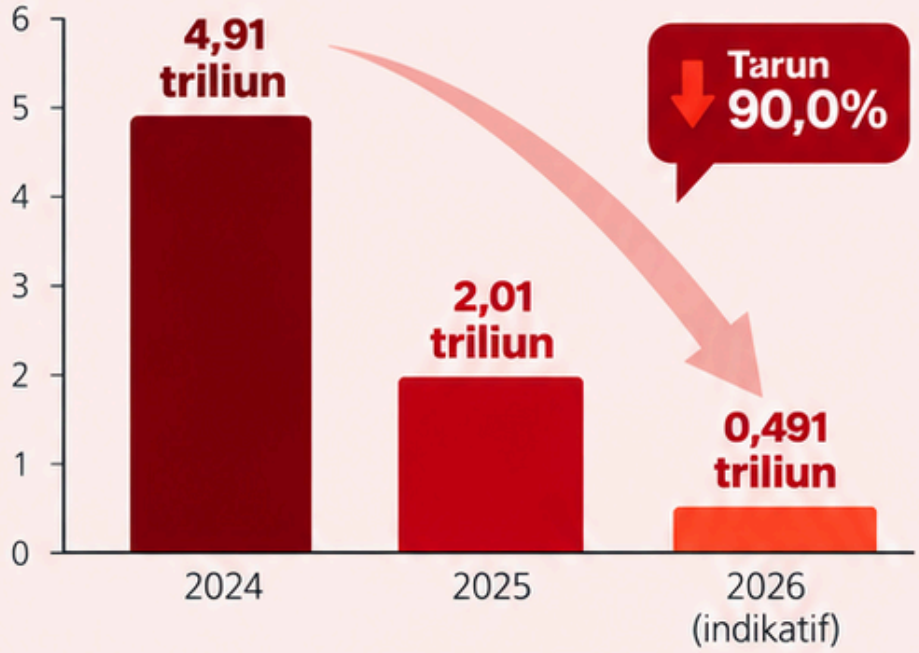
- Absen dari 17 Program Prioritas
- Absen dari 8 PHTC
- Tidak berdiri sendiri dalam RPJMN
- Belum ditopang peta jalan teknis yang kuat

! Ketahanan bencana masih terlihat sebagai komitmen normatif, belum sepenuhnya menjadi agenda strategis pembangunan nasional.

ANALISIS FISKAL KEBENCANAAN: REKAM JEJAK DAN KONTRADIKSI ANGGARAN

Penurunan drastis alokasi APBN untuk BNPB dari Rp4,91 triliun pada TA 2024 menjadi hanya Rp491 miliar pada indikatif TA 2026 menunjukkan **erosi komitmen fiskal pemerintah terhadap pengurangan risiko bencana (PRB).**

Tren Alokasi APBN untuk BNPB
(dalam triliun rupiah)



Pagu Anggaran BNPB TA 2026: Rp1,082 Triliun

Total pagu BNPB tahun 2026 sebesar Rp1,082 triliun terbagi dalam tiga alokasi utama:

1	**Operasional Murni dan Program Reguler** (belanja pegawai, administrasi birokrasi, kegiatan mitigasi)	**Rp490,96 miliar**
2	**Dana Siap Pakai (DSP / *On-Call Fund*)** untuk tanggap darurat	**Rp564,17 miliar**
3	**Dana stimulan perbaikan rumah rusak akibat bencana**	**Rp26,88 miliar**

Anatomi anggaran ini menegaskan paradoks kebijakan: ketika krisis hidrometeorologi dan geologi semakin meningkat secara historis, justru postur anggaran untuk lembaga penanggulangan bencana mengalami penyusutan yang drastis.

Alokasi stimulan perbaikan rumah rusak akibat bencana sebesar **Rp26,88 miliar** hanya sekitar **5,48%** dibandingkan komponen anggaran dasar/preventif BNPB (Rp490,96 miliar).

Pemangkasan Anggaran Lembaga Terkait

Lembaga	Pagu/Kebutuhan 2025 (triliun rupiah)	Pagu 2026 (triliun rupiah)	Penurunan	Keterangan
BNPB	**2,01**	**0,491** (491 miliar)	↓ **75,62%**	Penurunan alokasi sebesar 75,62%.
BMKG	**2,826**	**1,423**	↓ **50,35%**	Penurunan alokasi sebesar 50,35%.
BASARNAS	**3,86** (kebutuhan awal)	**1,56** (pagu disetujui)	↓ **59,33%**	Kekurangan/penurunan sebesar 59,33%. (selisih Rp2,29 triliun).

Ketimpangan ini membuktikan bahwa **pembiayaan penanggulangan bencana masih terjebak pada pendekatan kuratif-reaktif yang parsial,** bukan investasi pra-bencana yang sistemik untuk membangun ketahanan dan mengurangi risiko secara berkelanjutan.

Telaah Kebijakan

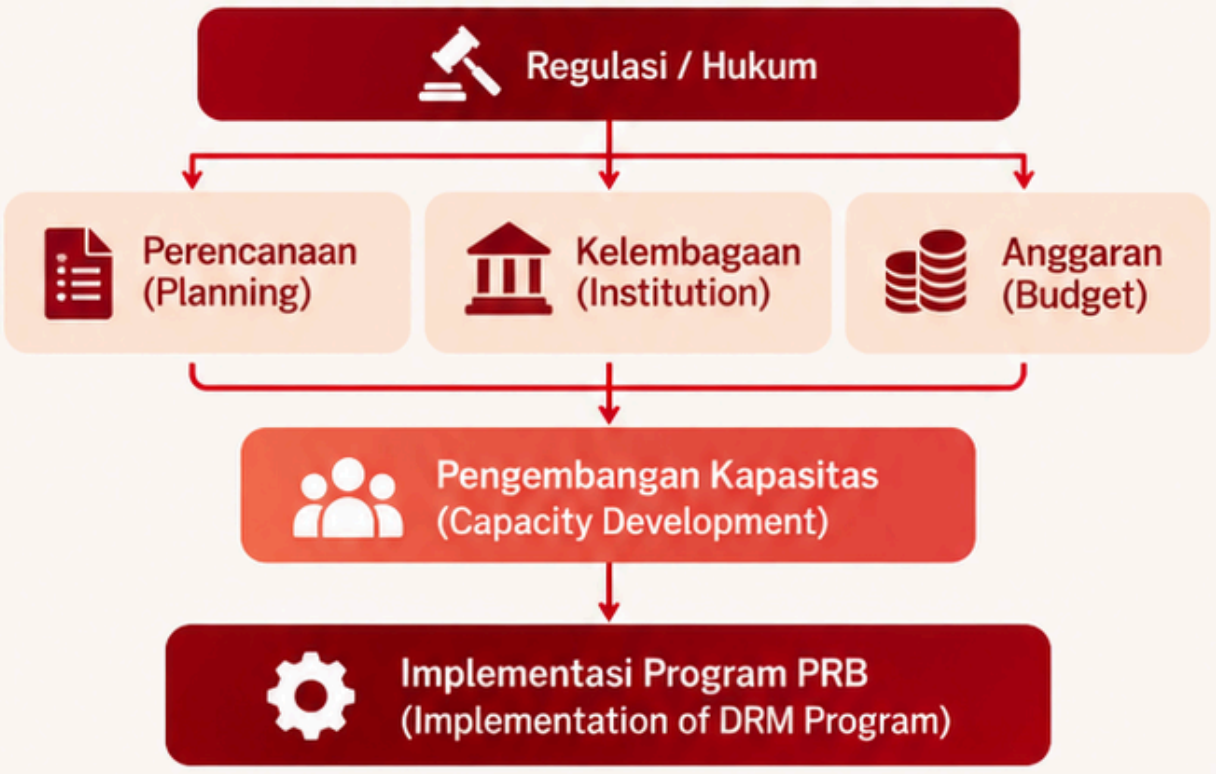
MudaBicara
Youthful Voice, Voice the Future

DAMPAK PEMANGKASAN ANGGARAN TERHADAP KESIAPSIAGAAN DAN KETAHANAN NASIONAL

Pemangkasan besar-besaran alokasi APBN untuk mitigasi bencana, kesehatan, dan infrastruktur menunjukkan pergeseran prioritas fiskal yang mengorbankan kapasitas ketahanan nasional demi mengamankan agenda prioritas baru. Pengelolaan bencana bahkan tidak masuk dalam 17 Program Prioritas maupun 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pemerintah, berbeda dengan dominasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendapatkan alokasi sebesar Rp268 triliun pada tahap awalnya.

Kerentanan terhadap krisis semakin diperparah oleh kompleksitas klasifikasi penanganan bencana yang terbagi ke dalam **4 situasi, 14 kategori program, dan 63 rincian kegiatan**. Struktur yang berlapis ini menciptakan **"administrative lag"** yang memperlambat respon di lapangan, sehingga bantuan sering terlambat saat krisis terjadi.

Sistem Manajemen Bencana di Indonesia



Manajemen risiko bencana di Indonesia pada dasarnya menggunakan ekosistem yang terintegrasi, di mana regulasi/ hukum menjadi landasan bagi perencanaan, kelembagaan, dan anggaran. Ketiga elemen tersebut bersama-sama membangun pengembangan kapasitas yang kemudian memungkinkan implementasi program penanggulangan risiko bencana (PRB).

Namun, dalam praktiknya sistem ini masih terikat pada pendekatan yang linier-konvensional dan kaku, dengan banyak hambatan birokrasi.

Sebagai negara *Ring of Fire* yang menghadapi bencana semakin dinamis serta krisis iklim yang kian nyata, terdapat ketimpangan struktural antara birokrasi kebencanaan yang lambat dengan ancaman yang meningkat cepat. Kondisi ini menciptakan risiko gagalnya negara merespons bencana secara tepat waktu.

Pada akhirnya, kebijakan bencana masih kalah oleh prioritas politik-fiskal lainnya.

Telaah Kebijakan

MudaBicara

HAMBATAN BIROKRASI DAN IMPLIKASI ADMINISTRATIVE LAG DALAM PENDANAAN BENCANA

Dasar Hukum	Mekanisme	Hambatan Prosedur	Implikasi di Lapangan
PP No. 22 Tahun 2008 (Pendanaan & Pengelolaan Bantuan Bencana)	Pencairan Dana Siap Pakai (DSP) wajib didahului Surat Keputusan Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana oleh Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota/Gubernur), berdasarkan asesmen awal BPBD.	Penetapan status sering tertunda akibat keraguan politik kepala daerah atau kelambatan asesmen awal oleh BPBD.	Jam-jam krusial penanganan darurat terlewat karena bantuan keuangan/logistik dari pusat tidak bisa dikucurkan sebelum SK terbit.
Perka BNPB No. 4 Tahun 2020 (Penggunaan DSP)	Prinsip akuntabilitas ketat; wajib melampirkan Rencana Needs Assessment / Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang diverifikasi BNPB, Kemenkeu, dan BPKP sebelum pengajuan pencairan cadangan.	Prosedur administrasi RKB menyandera tim lapangan yang sedang fokus pada evakuasi korban fisik, menciptakan beban dokumentasi di tengah krisis.	Pencairan DSP darurat tahap pertama sering memakan waktu **3 hingga 7 hari.**
Permendagri No. 77 Tahun 2020 (Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah)	Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) di APBD untuk bencana memerlukan verifikasi DPA dan persetujuan BPKAD.	Birokrasi daerah takut mengalokasikan BTT karena potensi temuan audit/risiko hukum jika administrasi dianggap kurang lengkap.	Respons first responder di daerah lambat dan pasif; BPBD enggan mengeksekusi dana BTT sebelum ada verifikasi tertulis dari APIP.
PMK No. 105/ PMK.05/2013 dan revisinya (mekanisme penyaluran hibah bencana ke daerah)	Dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dari pusat ke daerah melalui BA 999.02 wajib melalui usulan komprehensif, verifikasi fisik, dan persetujuan DPR/Kemenkeu.	Proses pengusulan hingga verifikasi lapangan BNPB/Kemenkeu memakan waktu berbulan-bulan hingga beroperasinya DIPA hibah.	Rekonstruksi rumah rusak dan fasilitas umum terhalang; masyarakat terdampak terpaksa tinggal di hunian sementara hingga bertahun-tahun, misalnya kasus Palu/Cianjur.

Masalah utama bukan terletak pada ketersediaan dana semata, melainkan pada **tidak fleksibelnya aturan pencairan** yang lebih mengutamakan **akuntabilitas ex-post** daripada **responsivitas ex-ante**, sehingga menyebabkan **kelumpuhan birokrasi pada fase krusial** penanganan bencana.

Telaah Kebijakan

MudaBicara

KETERTINGGALAN TEKNOLOGI MITIGASI DAN KEGAGALAN EFISIENSI FISKAL PREVENTIF



Rp17,61 trilliun

Realisasi DAK Fisik 2025 turun tajam menjadi **Rp17,61 triliun**, hanya **47,66%** dari pagu, dibandingkan 2024 sebesar **Rp50,89 triliun**.

Kapasitas daerah melemah

Penurunan ini melemahkan kapasitas daerah rawan bencana untuk memperbarui **sensor, infrastruktur fisik pra-bencana, serta teknologi mitigasi berbasis AI/IoT** yang presisi.

PBJ daerah terlambat

Keterlambatan pengadaan barang dan jasa (PBJ) di daerah menghambat belanja modal mitigasi, memaksa wilayah rentan mengandalkan sistem **peringatan dini yang sudah usang.**

Rp1,2 triliun

Alokasi riset dan teknologi pencegahan di BMKG, PVMBG, dan BNPB hanya **Rp1,2 triliun, sekitar 10%** dari total anggaran kebencanaan, membuktikan mitigasi berbasis sains **masih menjadi prioritas sekunder.**

Perbandingan Alokasi Anggaran Ex-Ante (Pra-Bencana) vs Ex-Post (Pascabencana)

Ex-Ante (Pra-Bencana) Temuan Utama	Ex-Post (Pascabencana) Temuan Utama
1 Pemotongan/efisiensi ex-ante memicu lonjakan belanja bantuan sosial ex-post sebesar **18,50% yoy,** mencapai **Rp183,62 triliun**, serta aktivasi mekanisme SP SABA secara mendadak.	1 DSP BNPB baru terealisasi optimal setelah disuntikkan ABT bansos dan SP SABA secara ad-hoc di pertengahan/akhir tahun.
2 Penyaluran DSP BNPB untuk tanggap darurat terpaksa disuntikkan secara ad-hoc di pertengahan/akhir tahun melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) bansos dan SP SABA.	2 Dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi dialokasikan lambat dan reaktif, baru melonjak setelah infrastruktur terlanjur rusak.
3 ***False efficiency***: penghematan fiskal pra-bencana justru memicu beban anggaran reaktif yang lebih besar dan mengganggu stabilitas APBN.	3 Realisasi belanja darurat / BA BUN 999.08 membengkak menjadi **Rp183,62 triliun (naik 18,50% yoy)** untuk menutupi dampak bencana.

Ketimpangan Alokasi Anggaran Kebencanaan *Ex-Ante vs Ex-Post*

Komponen Anggaran	Nilai	Proporsi / Keterangan
Anggaran **Program Mitigasi & Riset Pra-Bencana** (BMKG, PVMBG, BNPB)	**Rp1,2 triliun**	**~10%** (sangat minim/suboptimal)
Dana Cadangan Bencana & Belanja Reaktif/Pemulihan (BA BUN & BTT)	**Rp4,92 T – Rp11,78 T**	**~90%** (dominan reaktif / pemangkasan ex-ante memicu pembengkakan ex-post)
Total estimasi rata-rata kerugian ekonomi akibat bencana per tahun	**Rp22,8 triliun**	***Cost of Inaction***

Selama 2018–2021, belanja pencegahan BNPB selalu di bawah Rp1 triliun, namun realisasi pascabencana melonjak menjadi **Rp7,11–11,78 triliun. *False efficiency*** ini mengancam keberlanjutan fiskal jangka panjang.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Tata kelola bencana di Indonesia harus bergeser dari respons yang reaktif menuju kesiapsiagaan yang tangguh dan berkelanjutan.

A. Rekomendasi Jangka Pendek

- **Meningkatkan komunikasi yang inklusif antara pemerintah dengan masyarakat:** informasi kebencanaan harus disampaikan secara nasional sebagai langkah awal penanggulangan bencana.
- **Menginklusifkan koordinasi antara pemerintah pusat dengan lembaga-lembaga kebencanaan** untuk memaksimalkan proses penanggulangan bencana; pemerintah pusat perlu mendukung dan menstimulasi kerja BNPB, BMKG, Basarnas, Damkar, dan lembaga terkait.
- **Subsidi kebutuhan dasar armada Damkar daerah:** terbitkan Permendagri yang memprioritaskan alokasi APBD untuk bahan bakar, peralatan keselamatan, dan gaji personel Damkar serta Satpol PP di kabupaten/kota.

B. Rekomendasi Jangka Menengah

- **Pengalokasian Anggaran Belanja Tambahan (ABT):** Kementerian Keuangan perlu mengembalikan pagu anggaran reguler BMKG, Basarnas, dan BNPB untuk tahun berjalan guna menutup defisit operasional.
- **Ketentuan Anggaran Minimum (Mandatory Spending):** amandemen UU agar pemda wajib mengalokasikan minimal 1,5%–2% APBD untuk fungsi mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di BPBD.
- **Integrasi EWS ke media komunikasi massal:** wajibkan operator telekomunikasi mengintegrasikan sistem Cell Broadcast untuk seluruh warga di wilayah terdampak bahaya.

C. Rekomendasi Jangka Panjang

- **Kurikulum kebencanaan terintegrasi:** Kemendikdasmen memasukkan materi mitigasi bencana lokal ke muatan lokal atau sains dari SD sampai SMA.
- **Mengembangkan teknologi EWS dan peralatan bencana:** pemerintah berkolaborasi dengan akademisi dan lembaga penelitian untuk mengembangkan teknologi kebencanaan.
- **Membangun kebijakan berbasis mitigasi bencana:** seluruh kebijakan pemerintah harus berlandaskan mitigasi bencana agar paradigma berubah dari reaktif menjadi preventif.



PENUTUP

Mitigasi bencana adalah fondasi keselamatan nasional dan pembangunan berkelanjutan.

Indonesia, sebagai negara Ring of Fire, akan selalu hidup berdampingan dengan risiko gempa bumi, tsunami, dan erupsi. Oleh karena itu, **mitigasi bencana merupakan pilar utama bagi keselamatan nasional dan pembangunan berkelanjutan.**

Keberhasilan mitigasi tidak dapat bertumpu pada kesiapsiagaan pemerintah semata, melainkan membutuhkan sinergi yang kuat dengan masyarakat melalui edukasi berkelanjutan. Dengan mengubah paradigma dari sekadar merespons bencana menuju kesiapsiagaan, Indonesia dapat membangun regulasi yang kokoh, infrastruktur yang tangguh, serta budaya sadar bencana untuk melindungi generasi masa depan.

> **“Bencana tidak dapat dihentikan, tetapi dampaknya dapat dikurangi jika negara lebih siap, lebih cepat, dan lebih preventif.”**

